

BAB 1

PENDAHULUAN

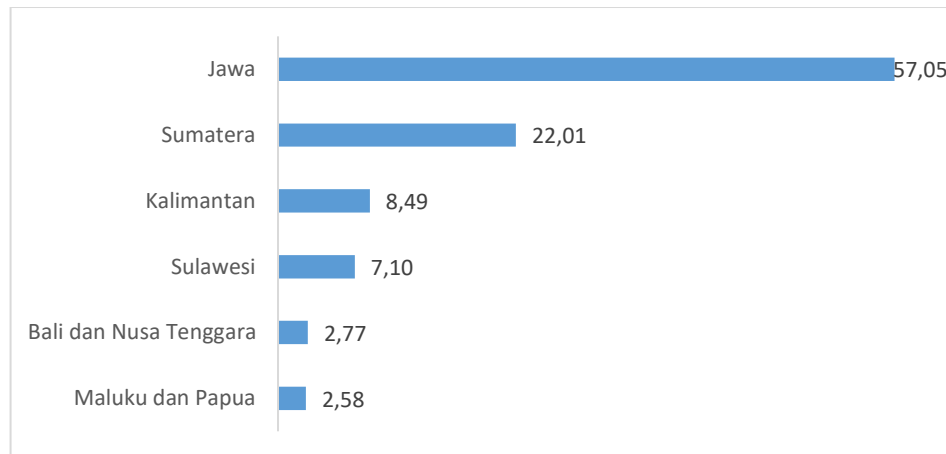
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari sekian banyak aspek pembangunan nasional, tujuan pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki berbagai aspek kehidupan. Bagi negara berkembang maupun negara maju, mencapai pembangunan nasional yang baik dan berkelanjutan sangat penting. Manusia memegang peranan penting dalam mengelola pembangunan ekonomi suatu negara karena menyediakan tenaga kerja, memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memadai (Borgan Bonerri et al., 2018).

Indikator yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik, parameter dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto, yang menggambarkan mengenai pertambahan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari keseluruhan sektor perekonomian pada suatu daerah tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dihitung dari dua faktor yaitu total pendapatan yang didapatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan total biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa (Munim et al., 2024).

Kegiatan perekonomian Indonesia terpusat di pulau Jawa sebagai penyumbang PDB Indonesia terbesar pada tahun 2023 yaitu sebesar 57,05%, kontribusi ini merupakan setengah dari total keseluruhan PDB di Indonesia,

selanjutnya kontribusi terbesar yang kedua berasal dari pulau Sumatera yaitu sebesar 22,01%, sedangkan kontribusi PDB terendah berada di Pulau Maluku dan Papua dengan PDB sebesar 2,58%. Berikut merupakan data kontribusi PDRB menurut pulau di Indonesia pada tahun 2023 disajikan pada gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah data)

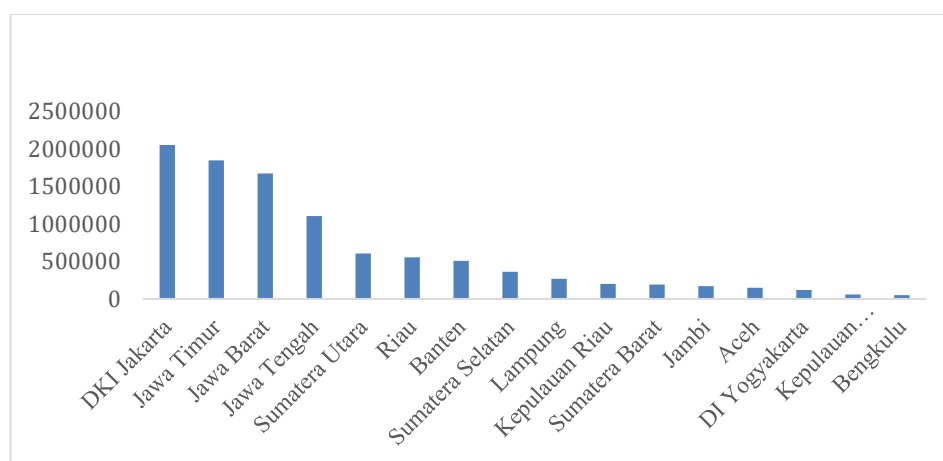
Gambar 1. 1 Kontribusi PDRB Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2023 (Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan data terkait dengan kontribusi PDRB ke PDB, sebagai penyumbang PDRB terbesar di Indonesia, Pulau Jawa jelas merupakan penyumbang pendapatan perkapita terbesar di Indonesia, diikuti oleh Pulau Sumatera. Ini karena peran masyarakat yang bekerja yang meningkatkan pendapatan perkapita. Meningkatnya PDRB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja (Warapsari et al., 2020).

Pengolahan sumber daya dengan efisien, diperlukan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih. Tenaga kerja yang terlatih dapat mengolah sumber daya dengan efisien dan teratur. Sumber daya manusia menjadi salah satu komponen terpenting dari setiap organisasi, baik perusahaan maupun lembaga. Perencanaan sumber daya manusia berkonsentrasi pada penciptaan kesempatan kerja dan

penyediaan angkatan kerja yang berkualitas, selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia membawa pada arah yang meliputi analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja di masa yang akan datang (Andriyani, 2016).

Jumlah penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan menjadi potensi atau model bagi pembangunan ekonomi karena telah menyediakan tenaga kerja yang banyak sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi produksi nasional terlebih jika kualitas sumber daya manusia nya yang bagus. Namun, akan menjadi masalah jika kualitas sumber daya manusia yang dimiliki rendah karena memiliki kemampuan dan produktivitas yang terbatas dalam menghasilkan produksi untuk kebutuhan sandang, pangan, papan (Ameliyah, 2012). Berikut merupakan data PDRB provinsi menurut pulau Jawa dan Pulau Sumatera di Indonesia pada tahun 2023 disajikan pada gambar 1.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah data)

Gambar 1. 2 PDRB Provinsi Menurut Pulau Jawa dan Pulau Sumatera di Indonesia Tahun 2023 (Milyar Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan gambar terkait PDRB di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tertinggi dibanding dengan pulau lainnya di Indonesia. Sepuluh provinsi dengan nilai PDRB tertinggi yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,

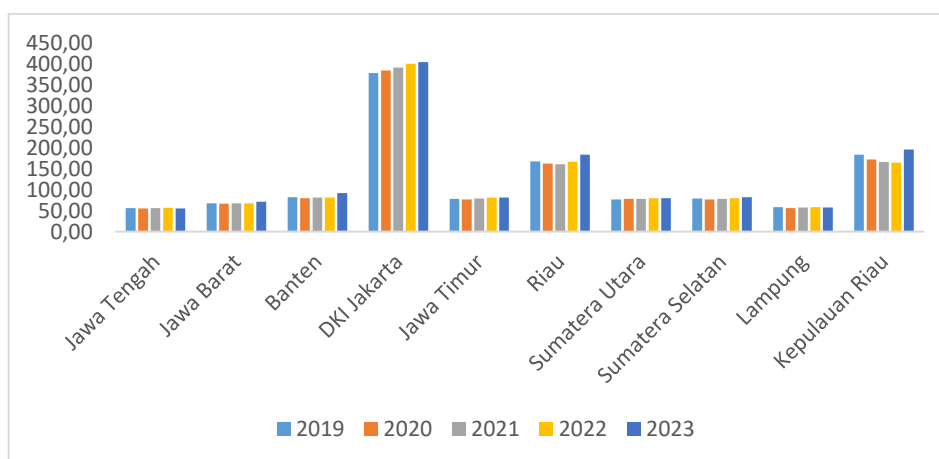
Banten, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Riau. PDRB yang tinggi mencerminkan kualitas tenaga kerja yang baik. Pelatihan dan pendidikan yang memadai dapat meningkatkan keterampilan pekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Menurut Kemenaker (2023) produktivitas adalah sikap mental dan etos kerja yang selalu berusaha meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas kehidupan untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif makro ekonomi, di mana output adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan dan inputnya yaitu jumlah tenaga kerja yang bekerja. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Menurut Zulfiyandi et al., (2021) produktivitas tenaga kerja merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses produksi barang dan/jasa, menggambarkan output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, menandakan bahwa tenaga kerja semakin produktif. Kemampuan untuk berkembang secara ekonomi diukur melalui produktivitas tenaga kerja. Untuk mempertahankan daya saing di seluruh dunia, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi sangat penting bagi perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas merupakan komponen penting menuju perekonomian yang lebih kompetitif dan sejahtera. Produktivitas tenaga kerja adalah output yang dihasilkan oleh setiap

pekerja pada tahun tertentu. Produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa tenaga kerja semakin produktif (Puspasari & Handayani, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja merupakan kunci dalam ekonomi. Hal ini terkait dengan fakta bahwa teknologi yang digunakan serta ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja sangat mempengaruhi proses produksi dan biaya produksi, serta biaya produksi mempengaruhi daya saing bangsa di pasar internasional (Mukhlisiana & Roza Adry, 2021). Berikut data produktivitas tenaga kerja sepuluh provinsi di Indonesia tahun 2019-2023 disajikan pada gambar 1.3.



Sumber: Pusdatik Kementerian Ketenagakerjaan (diolah data)

Gambar 1. 3 Produktivitas Tenaga Kerja Sepuluh Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa angka produktivitas sepuluh provinsi di Indonesia tidak merata. Pada tahun 2023 produktivitas tenaga kerja tertinggi yaitu Jakarta sebesar 404.70 juta rupiah per tenaga kerja karena dan kedua tertinggi oleh Kepulauan Riau sebesar 196.25 juta rupiah per tenaga kerja. Provinsi dengan penyumbang produktivitas tenaga kerja terendah yaitu Lampung sebesar

57.31 juta rupiah per tenaga kerja dan provinsi Jawa Tengah sebesar 55.16 juta rupiah per tenaga kerja.

Ketimpangan yang terjadi pada produktivitas tenaga kerja sepuluh provinsi di Indonesia menjadi penghambat bagi peningkatan pendapatan regional, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain terjadi ketimpangan, produktivitas tenaga kerja di pulau Jawa dan pulau Sumatera juga mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Dalam hal masalah ini, pemerintah harus memperhatikan komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, strategi peningkatan produktivitas yang direncanakan harus tepat, faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan. Pendidikan mempunyai peran penting dalam produktivitas tenaga kerja, Rata-rata lama sekolah digunakan dalam menentukan tingkat Pendidikan. Rata-rata lama sekolah dihitung dari jumlah tahun yang dapat dihabiskan oleh penduduk di wilayah tersebut untuk menyelesaikan pendidikan (Chairunnisa & Juliannisa, 2022).

Rata-rata lama sekolah adalah indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti seseorang bisa menjadi nilai tambah. Hal ini dijelaskan jika seseorang memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi atau banyak mengikuti pelatihan, maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki akan semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Puspasari & Handayani, 2020). Berikut rata-rata lama sekolah sepuluh provinsi di Indonesia disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Rata-rata Lama Sekolah Sepuluh Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023 (Tahun)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Tengah	7.53	7.69	7.76	7.93	8.01
Jawa Barat	8.36	8.54	8.6	8.78	8.83
Banten	8.74	8.89	8.93	9.13	9.15
DKI Jakarta	11.06	11.13	11.17	11.31	11.45
Jawa Timur	7.59	7.78	7.88	8.03	8.11
Riau	9.03	9.14	9.19	9.22	9.32
Sumatera Utara	9.45	9.54	9.58	9.71	9.82
Sumatera Selatan	8.18	8.24	8.30	8.37	8.50
Lampung	7.92	8.05	8.08	8.18	8.29
Kepulauan Riau	9.99	10.12	10.18	10.37	10.41

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah data)

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama sekolah sepuluh provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu DKI Jakarta karena memiliki infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke berbagai jenjang pendidikan. Hal ini mendorong penduduk untuk menempuh pendidikan lebih lama (Bappeda, 2021). Rata-rata lama sekolah terendah ditempati oleh Jawa Tengah karena sebagian besar fasilitas pendidikan di Jawa Tengah terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan daerah pedesaan masih kekurangan sekolah yang memadai dan Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Keterbatasan ekonomi menyebabkan banyak keluarga menghadapi kesulitan, sehingga anak-anak terpaksa berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga (Prameisa, 2021).

Selain pendidikan, aspek lain yang berpengaruh terhadap produktivitas yaitu teknologi. Kualitas tenaga kerja di Indonesia pasti akan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah

memberikan dampak yang signifikan pada dunia ketenagakerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi, sehingga dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang sama. Teknologi juga dapat menghasilkan barang dan jasa baru, yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi (Ningsih, 2024). Berikut Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) sepuluh provinsi di Indonesia pada tabel 1.2.

**Tabel 1. 2 IP-TIK Sepuluh Provinsi di Indonesia
Tahun 2019-2023 (Persen)**

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Tengah	5.51	5.74	5.82	5.83	5.86
Jawa Barat	5.86	6.00	6.08	6.16	6.15
Banten	5.89	5.99	6.13	6.29	6.38
DKI Jakarta	7.27	7.46	7.66	7.64	7.73
Jawa Timur	5.50	5.73	5.85	5.91	5.96
Riau	5.33	5.74	5.90	6.02	6.07
Sumatera Utara	5.19	5.44	5.75	5.90	6.04
Sumatera Selatan	4.91	5.30	5.64	5.76	5.88
Lampung	4.83	5.15	5.58	5.63	5.78
Kepulauan Riau	6.39	6.46	6.58	6.69	6.66

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah data)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa IP-TIK sepuluh provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. DKI Jakarta merupakan IP-TIK tertinggi karena didorong oleh pencapaian tiga sub-indeks pembangunan TIK yaitu sub-indeks akses dan manufaktur, sub-indeks penggunaan, dan sub-indeks keahlian yang terbilang cukup baik (Untari et al., 2020). Kemudian IP-TIK terendah ditempati oleh Lampung, hal ini karena keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti akses

internet yang belum merata, dapat menghambat peningkatan IP-TIK. Tingkat literasi digital dan keterampilan penduduk dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang masih perlu ditingkatkan (Adristi & Munaf, 2024).

Tingkat produktivitas dan daya saing tenaga kerja secara umum juga tercermin dari tingkat upah di setiap wilayah. Adanya upah minimum untuk menyelamatkan dan melindungi para pekerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pekerja tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan dan perekonomian pada umumnya. Upah minimum provinsi merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi (Fadillah et al., 2020).

Tingkat upah juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, dengan adanya upah dan pengukuran, membuat produktivitas tenaga kerja lebih efisiensi, karena karyawan akan lebih produktif saat upah ditentukan (Tania & Amar, 2022). Jika upah yang diterima pekerja sesuai dengan standar atau sebanding dengan usaha yang telah dilakukan, maka pekerja akan bekerja dengan maksimal, serta kualitas dari pekerja itu sendiri akan meningkat dan produktivitas yang dihasilkan. Berikut Upah Minimum Provinsi (UMP) sepuluh provinsi di Indonesia pada tabel 1.3.

**Tabel 1. 3 Upah Minimum Sepuluh Provinsi di Indonesia
Tahun 2019-2023 (Rupiah)**

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Tengah	1.605.396	1.742.015	1.798.979	1.812.935	1.958.169
Jawa Barat	1.668.373	1.810.351	1.810.351	1.841.487	1.986,670
Banten	2.267.990	2.460.997	2.460.996	2.501.203	2.727.812
DKI Jakarta	3.940.973	4.267.349	4.416.186	4.641.854	4.901.798
Jawa Timur	1.630.059	1.768.777	1.868.777	1.891.567	2.040.244
Riau	2.662.026	2.888.564	2.888.564	2.938.564	3.191.662
Sumatera Utara	2.303.403	2.499.423	2.499.423	2.522.609	2.710.493
Sumatera Selatan	2.804.453	3.043.111	3.270.093	3.144.446	3.404.177
Lampung	2.241.270	2.432.002	2.432.001	2.440.486	2.633.284
Kepulauan Riau	2.769.754	3.005.460	3.005.460	3.050.172	3.279.194

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah data)

Berdasarkan Tabel 1.3. upah minimum sepuluh provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Upah tertinggi berada di DKI Jakarta karena pusat bisnis dengan banyak perusahaan nasional dan internasional yang beroperasi. Kehadiran industri dan perusahaan besar ini mendorong permintaan tenaga kerja yang kompeten, sehingga upah yang ditawarkan cenderung lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. Upah terendah berada di Jawa Tengah karena biaya hidup relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, sehingga kebutuhan hidup layak dan UMP yang ditetapkan pun lebih rendah. Produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah mungkin lebih rendah dibandingkan dengan daerah industri maju, yang berdampak pada penetapan upah minimum yang lebih rendah (BPS, 2011).

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja yaitu oleh Puspasari & Handayani (2020) menyatakan variabel tingkat kesehatan, pendidikan, dan upah minimum terhadap produktivitas

tenaga kerja di provinsi Jawa Tengah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Attaqi (2022) menyatakan variabel tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan tidak berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja, sedangkan variabel usia dan upah memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2024) menyatakan bahwa variabel teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Sepuluh Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan, teknologi, dan upah minimum secara parsial terhadap produktivitas tenaga kerja sepuluh provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan, teknologi, dan upah minimum secara bersama-sama terhadap produktivitas tenaga kerja sepuluh provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis serta mengetahui pengaruh pendidikan, teknologi, dan upah minimum secara parsial terhadap produktivitas tenaga kerja sepuluh provinsi di Indonesia tahun 2014-2023.

2. Menganalisis serta mengetahui pengaruh pendidikan, teknologi dan upah minimum secara bersama-sama terhadap produktivitas tenaga kerja sepuluh provinsi di Indonesia tahun 2014-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi kontribusi serta acuan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah terkait dalam hal membuat suatu kebijakan atau pembangunan yang lebih baik kedepannya. Diharapkan pula dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja khususnya di 10 provinsi wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yaitu Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Riau Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung dan Kepulauan Riau.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi civitas akademika terkait pengaruh pendidikan, teknologi dan upah minimum terhadap produktivitas tenaga kerja sepuluh provinsi di Indonesia tahun 2014-2023. Diharapkan pula sebagai bahan literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa maupun berhubungan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan sepuluh provinsi di Indonesia diantaranya Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Riau Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung dan Kepulauan Riau.

